

# ISLAM, CIVIL SOCIETY DAN PERUBAHAN POLITIK DI ERA TRANSISI DEMOKRASI:

Studi Peran Nahdlatul Ulama (NU) Jember Dalam Membangun Relasi kekuasaan dengan Negara di Tingkat Lokal

Oleh:

**M. Khusna Amal**

(Mahasiswa Program Doktor Universitas Airlangga Surabaya)

## **Abstract**

*After The New Era (Soeharto's regime), the position of our country is claimed to be less expressive than The New Era authoritarianism regime. Our country seems like become a new political stage which so open that every social element can reach it. This political system which starts to melt enables every social element to be involved in practical political for getting the country political stage. Nevertheless, NU Jember also responds the changing of political system After The New Era by involving in the politic. NU Jember's structural constrain in practical political is solved by involving the traditionalist muslim organization in practical political stage without changing the organization to be political party, but using the organization as an asset to be involved in practical political world. Those political practices which considered pragmatic oriented that make NU Jember evaluated to be less capable in progressive role to promote rapid transition to regional democracy.*

**Kata Kunci:** *Islam, Civil Society, Era Transisi Demokrasi, Nahdlatul Ulama (NU) Jember*

## **PENDAHULUAN**

Memasuki era transisi demokrasi sekarang ini, pola relasi antara elemen *civil society* dari organisasi keislaman dengan negara mulai banyak mengalami perubahan. Ada kecenderungan *civil society Islam* (baca: *civil Islam*), berbondong-bondong mendekati diri dan masuk ke ranah kekuasaan negara. Meski kondisinya tidak sama persis dengan periode Orde Lama, banyaknya organisasi Islam yang terlibat dalam pertarungan politik praktis, telah membawa implikasi lahirnya konflik baik vertikal maupun horisontal (seperti perkelahian politik di lingkungan internal umat Islam).<sup>1</sup> Banyak kasus yang menun-

<sup>1</sup> Pada periode 1950-1960-an, tumbuh subur aneka organisasi dan asosiasi sosial. Hanya saja aneka elemen *civil society* tersebut terpolarisasi ke dalam kecenderungan ideologi politik yang masing-

jukkan bahwa antar umat Islam yang memiliki latar organisasi, ideologi, dan afiliasi politik, ataupun partai politik yang berbeda lintas terlibat konflik internal. Kondisi demikian inilah yang menjadikan peran organisasi Islam sebagai kelas menengah yang memiliki peran strategis dalam mendorong lokomotif *civil society*,<sup>2</sup> terindikasi

masing memiliki tujuan untuk saling memperluas kekuasaan politik. Akibatnya, di antara elemen *civil society* terlibat konflik luar biasa —sebuah konflik yang merefleksikan pertentangan politik, kelas dan kultural. Konflik-konflik di lingkungan *civil society* atau antara *civil society* dengan *state* inilah yang dinilai banyak pihak telah berkontribusi terhadap kemunduran demokrasi. Edward Aspinall, "Indonesia Transformation of Civil Society and Democratic Breakthrough", dalam Muthiah Alagappa (ed.) *Civil Society and Political Change in Asia*, California: Stanford University Press, 2004, hlm. 62-69.

<sup>2</sup> Dalam tulisan ini diskursus *civil society*

## Islam, Civil Society Dan Perubahan Politik Di Era Transisi Demokrasi

mengalami involusi. Dengan ungkapan lain, tumbuh suburnya asosiasi atau organisasi keagamaan yang sesungguhnya bisa menjadi –meminjam bahasa Putnam-- *social capital* bagi demokrasi, kenyataannya justru membawa involusi bagi pembangunan demokrasi.<sup>3</sup>

dan demokrasi banyak mengadopsi perspektif Tocquevillian, Putnam dan Habermas. Alexis de Tocqueville memandang *civil society* sebagai kekuatan positif dalam menindaklanjuti demokrasi dengan catatan tercipta suatu kondisi kesamaan sosial dan saat bersamaan pemerintah pusat mengalami penurunan. *Civil society* dipahami pula sebagai kekuatan penyeimbang kekuatan negara. Di sini, ia menekankan kesinambungan antara asosiasi dengan demokrasi, atau dalam terminologi kontemporer hubungan antara *civil society* dengan demokrasi. Sedangkan Putnam berpandangan bahwa partisipasi dalam kelompok sosial dinilai mampu menghasilkan modal sosial yang cukup vital bagi pembangunan demokrasi yang sehat. Senada dengan dua pandangan di atas, Muthiah Alagappa mengambil mendefinisikan *civil society* sebagai sebuah ruang publik yang nyata bagi organisasi, komunikasi dan diskursus reflektif, pemerintahan di antara individu-individu dan kelompok yang mengambil tindakan kolektif untuk menyebarkan cara-cara sipil dalam mempengaruhi negara beserta aneka kebijakan yang digariskannya, dengan catatan orang-orang yang terlibat dalam gerakan tersebut tidak berorientasi pada pencarian keuntungan (*profit*). Soal ruang publik, Habermas menjelaskan ruang publik tersebut sebagai ruang bagi diskusi rasional, debat, konsensus, diskusi sosial-politik, yang dapat digunakan untuk menjembatani, salah satunya, kontradiksi antara kepentingan warga negara dengan kaum borjuis. Ruang publik juga dapat digunakan untuk membangun opini publik, memberikan tanggapan langsung terhadap apapun menyangkut kepentingan mereka sambil berusaha mempengaruhi praktik-praktik politik. Baca Muthiah Alagappa, *Civil Society and Political Change*....., hlm., 26-31; A. Hall (ed.) "Civil Society: Theory, History, Comparison", dalam John A. Hall, *In Search of Civil Society*, Cambridge, Massachusetts, Polity Press, 1995, hlm. 18, 143, 225-226; B. Hari Juliawan, *Ruang Publik Habermas: Solidaritas Tanpa Intimitas*, dalam *Jurnal Basis*, Nomor 11-12, Tahun Ke-53, November-Desember 2004, hlm., 32-33.

<sup>3</sup> *Civil society* yang kuat memang merupakan sebuah prakondisi bagi demokrasi. Kendatipun sangat penting, *civil society* bukanlah satu-satunya prasyarat dalam rangka proses menuju terciptanya masyarakat yang demokratis. Arif Budiman, *Introduction: From A Conference to a Book*, dalam Arif Budiman (ed.) *State and Civil Society*

Organisasi-organisasi Islam yang terlibat dalam kancah perpolitikan praktis yang gilirannya mampu menghantarkan sebagian dari kader mereka masuk ke panggung kekuasaan negara telah melahirkan peran ganda. Di satu sisi, organisasi Islam berusaha memainkan peran pemberdayaan masyarakat sipil, namun di sisi lain, mereka juga berperan mem-*back up* kekuasaan negara. Alih-alih organisasi Islam memposisikan diri sebagai bumper masyarakat sipil agar negara tidak menjalankan kekuasaannya secara berlebihan, ia malah menjadi bumper negara.<sup>4</sup> Fenomena semacam ini tidak saja terjadi di level nasional, tetapi juga di level lokal sebagaimana kasus di Jember.

Karena itu, untuk dapat memahami bagaimana pola relasi antara *Islamic civil society organization*, sebagaimana direpresentasikan oleh NU Jember, dalam membangun hubungan kekuasaan dengan negara pasca Orde Baru, beberapa persoalan yang penting ditelusuri lebih jauh adalah: *pertama*, bagaimana konteks makro meliputi perubahan sosial-politik pada level nasional, dinamika organisasi Islam (dalam hal ini NU) pusat, dinamika relasional NU dan negara masa lampau dan relasinya dengan masa kini, dan berbagai variabel makro lainnya, turut mengonstruksi praktik NU Jember dalam membangun *power relation* dengan negara di tingkat lokal; *kedua*, dihadapkan pada struktur sosial-politik era transisi demokrasi pasca Orde Baru, yang satu sisi memberikan peluang (*enabling*) dan sekaligus hambatan (*constraints*), lantas bagaimana NU Jember memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut untuk membangun kemandiriannya dalam bidang sosial, ekonomi dan politik; *ketiga*, melalui aneka modal sosial (*social capital*) tersebut –kemandirian dalam sektor sosial, ekonomi dan politik, lantas ba-

*in Indonesia*, Australia: Centre for Asian Studies

Monash University, 1990, hlm. 365; Muhammad

A.S. Hikam, *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan*

*Civil Society*, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 112.

<sup>4</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju*

*Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm.

349.

gaimana NU Jember mendayagunakannya dalam membangun *power relation* dengan negara; keempat, dilihat dari reposisi dan peran yg diartikulasikan NU Jember dalam membangun *power relation* dengan negara, menjadi pintu masuk untuk menganalisis perubahan yang terjadi, dan jika memang diidentifikasi mengalami perubahan, perlu ditelaah seperti apa *trend* perubahan tersebut?

### SEKILAS NU JEMBER

Ada pandangan yang tidak seragam mengenai ihwal pendirian NU Jember. Ada yang berpendapat bahwa secara formal, NU Jember berdiri pada tahun 1928, tepat dua tahun setelah pendirian NU tingkat nasional di Surabaya tahun 1926. Seperti dimaklumi, pendirian NU tingkat nasional melibatkan kyai-kyai dari Jawa Timur. Dimungkinkan, kyai-kyai dari Jember saat itu, seperti K.H. Mohammad Shiddiq, ada yang terlibat dalam proses pendirian NU yang kemudian merintis pendirian NU Cabang Jember.

Menurut KH. Ahmad Mursyid, NU Jember secara formal baru berdiri pada periode 1930-an, tepatnya 1932. Pada tahun 1934, PBNU menyelenggarakan Mukhtar IX bertempat di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menetapkan KH. Mahfudz Shiddiq dari Jember sebagai salah satu ketua. Diadakannya mukhtar dalam skala nasional sudah barang tentu melibatkan cabang-cabang NU yang ada di berbagai wilayah, termasuk NU Jember yang diprediksikan sudah berdiri dan ikut terlibat di arena mukhtar tersebut.

Tampaknya, informasi KH. Ahmad Mursyid tersebut cukup relevan jika dikaitkan dengan temuan penelitian Halim Soebahar (2001: 25-26) tentang "*Arsitek Pemikiran Islam Indonesia: Catatan Biografi K.H. Achmad Shiddiq*" yang mengungkapkan bahwa sejak 1934 KH. Mohammad Shiddiq sudah memberikan dukungan terhadap NU yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari. Dukungan ini disampaikan saat KH. Wahab Hasbullah dan KH. Masykur sowan kepadanya sambil bercerita men-

genai proses berdirinya NU. Keduanya tidak lupa menyebut keterlibatan KH. Mohammad Khalil Bangkalan dalam membidani lahirnya organisasi tersebut. Menanggapi perbincangan yang disampaikan kedua tokoh NU itu, KH. Mohammad Shiddiq menjawab "*ya... insya Allah saya akan selalu mendukung perjuangan NU, dan saya hanya bisa titip anak saya Mahfudz Shiddiq agar dapat membantu sampeyan (anda)*".<sup>5</sup>

Dari berbagai pandangan di atas, ada satu benang merah bahwa berdirinya NU Jember itu tidak bisa dilepaskan dari peran besar arsitek penyebaran Islam di Jember yaitu KH. Mohammad Shiddiq. Kepemimpinannya di kemudian hari berhasil melahirkan tokoh-tokoh NU Jember yang punya reputasi nasional seperti KH. Mahfudz Shiddiq dan KH. Achmad Shiddiq, keduanya sama-sama putra dari KH. Mohammad Shiddiq. KH. Mahfudz Shiddiq pernah menjadi pembimbing KH. Wahid Hasyim (mantan Menteri Agama dan ketua PBNU), putra *Hadratus Syaikh* KH. Hasyim Asy'ari, dan ayahanda dari KH. Abdurrahman Wahid. Sementara, KH. Achmad Shiddiq (Ra'is Syuriyah) sendiri pernah berduet dengan KH. Abdurrahman Wahid (Ketua Tanfidziyah) dalam menjalankan nahkoda NU hasil Mukhtar 1984.

Sementara itu, perkembangan terkini menunjukkan keberadaan NU Jember yang kian matang, dinamis dan progresif. Kondisi keorganisasian baik menyangkut aspek administrasi keorganisasian, kesekretariatan, kepengurusan dan program kerja, mulai disusun dan didokumentasikan dengan cukup baik. Semua ini tidak lepas dari usaha progresif kepengurusan NU baru yang terus melakukan pembenahan administratif keorganisasian. Pengalaman panjang keberlangsungan perjalanan NU Jember masa lalu yang cenderung menonjolkan aktivitas kultural keagamaan dan mengabaikan aspek struktural

<sup>5</sup> Halim Soebahar, *Arsitek Pemikiran Islam Indonesia: Catatan Biografi K.H. Achmad Shiddiq*, 2001: hlm. 25-26.

kelembagaan, kini mulai dibenahi, demikian KH. Muhyiddin Abdusshomad, --Ketua Tanfidziah NU Jember (periode 1999-2004 & 2004-2010) dan sekarang Rais Syuriah PCNU Jember (periode 2010-2016), memberikan gambaran kondisi NU Jember saat ini. Tampilnya kyai muda progresif sebagai ketua NU Jember menggantikan Mukhsun Sudjono ini sedikit banyak mampu mewarnai organisasi NU Jember dengan tampilannya yang semakin kultural. Berbeda dengan kepemimpinan Mukhsun yang memang lebih dikenal sebagai politisi NU dari pada keulamaannya.

Dalam periode kepengurusan 1999-2004 & 2004-2010, aneka pembenahan khususnya pada aspek struktural keorganisasian (*jam'iyah*) dan kemasyarakatan (*jama'ah*) NU Jember terus dipermantap. Dari dokumen Konperensi Cabang NU Jember pada 2004-2010 diketahui bahwa visi dan misi NU Jember tetap diorientasikan pada upaya pelestarian ajaran Islam *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* yang menganut salah satu madzhab empat di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam wadah negara kesatuan RI. Berdasarkan visi dan misi serta kondisi riil NU Jember, maka kebijaksanaan program-program NU Jember diarahkan kepada: (1) meningkatkan amal dan prestasi NU baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai upaya mencapai kemaslahatan ummat; (2) meningkatkan sumber daya manusia Nahdlatul Ulama (SDMNU); (3) meningkatkan kelembagaan NU secara organisatoris di samping kekuatan NU secara kultural; (4) mempererat jaringan komunikasi individu dan kelompok untuk memecahkan masalah-masalah bersama yang dilandasi *ukhuwah nahdliyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah bashariyah*; (5) meningkatkan kesadaran dalam mengamalkan khittah NU 1926.<sup>6</sup>

Kini, wajah NU Jember tidak lagi dimonopoli dan dihiasi tokoh-tokoh tua dari kalangan pesantren, melainkan kombinasi dengan tokoh-tokoh muda. Sementara itu, program-program kegiatan, baik yang

terkait dengan aspek struktural keorganisasian maupun kultural warga masyarakatnya, mulai tersusun secara sistematis dengan memiliki sasaran dan target yang jelas. Semua ini tidak bisa dilepaskan dari kepengurusan NU Jember yang mulai diramalkan oleh kader-kader muda terdidiknya dari kalangan pesantren, akademisi, dan para aktivis. Sebagai contoh, satu hal yang dapat dikatakan baru yang terjadi pada NU Jember periode 1999-2004 adalah restrukturisasi sistem reformasi kepemimpinan NU Jember melalui "Debat Kandidat" yang dimotori kelompok muda terdidik. Suatu fenomena reformatif yang dapat dibilang belum begitu lama membumi dalam tradisi transformasi kepengurusan PCNU Jember.

### **BERMULA DARI GONJANG GANJING POLITIK NASIONAL 1998**

Praktek perpolitikan rezim Orde Baru yang dikenal otoriter, untuk sementara waktu, memang berhasil meredam gejolak sosial di kalangan sipil. Tetapi, tindakan represif pemerintahan Orde Baru tersebut tidak selamanya efektif untuk mempertahankan kemapanan kekuasaan yang dipegangnya. Terbukti, elemen-elemen sipil yang diperlakukan secara tidak adil, termasuk di dalamnya kekuatan-kekuatan Islam politik yang telah didzalimi selama pemerintahan Orde Baru, telah mengkristal menjadi gelombang besar kekuatan reformasi sipil yang mampu menumbangkan hegemoni pemerintahan Orde Baru. Tepat apa yang dikatakan Bahtiar Effendy bahwa perkembangan yang terjadi sejak Mei 1998 yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari kekuasaan, pada dasarnya merupakan upaya kolektif dalam bentuknya gerakan reformasi, untuk meminjam terminologi Merilee S. Grindle—"melawan negara".<sup>7</sup>

Mundurinya Soeharto dari kursi kepresidenan menandai berakhirnya era

<sup>7</sup> Bahtiar Effendy, *Repolitikasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* Bandung: Mizan, 2000, hlm. 347.

<sup>6</sup> Dokumen Konfercab NU Jember 1999.

pemerintahan Orde Baru dan sekaligus membuka era baru bagi bangsa Indonesia yang dikenal dengan era Pasca Orde Baru atau populer dengan sebutan Era Reformasi. Tampaknya, penamaan era reformasi sebagai ikon pemerintahan pasca Orde Baru terkait erat dengan keberhasilan gerakan reformasi sipil dalam mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru, kondisi sosial-politik masyarakat bangsa pun juga mengalami perubahan. Peta sosial-politik era pasca Orde Baru ditandai dengan apa yang dikenal *euphoria* yang luar biasa yang ditandai oleh kritik, hujatan, dan cercaan, baik dalam tingkat praktek maupun ucapan, tindakan atau tulisan, dikemukakan secara apa adanya. Tidak ada lagi rasa *ewuh pakewuh* karena pada dasarnya masyarakat telah bosan dengan bahasa-bahasa yang eufimistik dan tidak menunjukkan makna yang sebenarnya. Karena, yang diinginkan adalah transparansi, keterbukaan, kejelasan, dan kepastian.<sup>8</sup>

Era pasca Orde Baru juga telah menghantarkan masyarakat bangsa ke dalam situasi sosial-politik yang bersifat transisional. Dikatakan transisional, karena gerakan reformasi tidak otomatis mampu menciptakan strukturisasi tatanan kehidupan sosial-politik yang benar-benar demokratis (konduktivitas) sebagaimana yang diharapkan bersama. Keberadaan Habibie yang ditunjuk Soeharto menggantikan dirinya menjadi presiden, dilihat banyak pihak sebagai pemerintahan yang bersifat transisional<sup>9</sup> dan kurang *legitimate*. Karena posisi Habibie tidak dipilih oleh rakyat, tetapi mengganti Soeharto. Menurut Ignas Kleden, Habibie hanya memiliki persyaratan secara legal tetapi tidak memiliki persyaratan secara legitimasi.<sup>10</sup> Meski demikian, tampaknya Habibie masih dipercaya untuk mempersiapkan pemilihan

umum guna membentuk pemerintahan yang *legitimate* dan melakukan restrukturisasi tatanan kehidupan sosial-politik bangsa yang lebih demokratis sebagaimana amanat reformasi. Beberapa kebijakan nasional yang dilakukan B.J. Habibie sebagai respon terhadap tuntutan gerakan reformasi sipil antara lain berupa pemberian kebebasan kepada dunia pers dengan mencabut peraturan perundangan pers yang selama ini dinilai mengekangannya, pembebasan nara pidana politik, dan membuka kran kebebasan publik untuk mengeluarkan pendapat dan berbicara sesuai dengan semangat UUD 1945.

Sementara itu, mengenai persiapan pemilu sebagaimana yang dituntut masyarakat, B.J. Habibie menindaklanjuti secara responsif. Tindakan pertama yang dilakukan B.J. Habibie adalah merevisi Undang-Undang pembatasan kepartaian politik yang selama ini dipertahankan pemerintah Orde Baru. Selanjutnya, B.J. Habibie segera memfasilitasi pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (PPPKPU) atau Tim Sebelas (anggota terdiri dari sebelas orang) yang dikenal dengan sebutan Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>11</sup>

Kebijakan politik kepartaian yang digariskan pemerintahan B.J. Habibie disambut antusias oleh masyarakat dengan mengekspresikannya melalui pembentukan partai politik yang tidak kecil jumlahnya. Pada Pemilu pertama pasca Orde Baru

<sup>11</sup> Tugas utama KPU antara lain: merencanakan dan mempersiapkan pemilihan umum; menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilu; membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan mengoordinasikan kegiatan pemilu mulai dari tingkat pusat sampai Tingkat Pemungutan Suara (TPS); menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; menetapkan keseluruhan hasil pemilu di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II; mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil pemilu; memimpin tahapan ketiga pemilu; dan selambat-lambatnya tiga tahun setelah pemilu dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem pemilu. Lihat Komisi Pemilihan Umum, *Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta, tt. hlm. 232-242.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 350-351.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 349.

<sup>10</sup> Ignas Kleden, *Melacak Akar Konsep Demokrasi: Suatu Tinjauan Kritis*, dalam Ahmad Suaedy (ed.) *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*, Yogyakarta: LKIS, 2000, hlm. 5.

(1999), kontestan pemilu mencapai 48 partai. Hasil pemilu 1999 itu sendiri menempatkan lima besar perolehan kursi parlemen dengan PDI-P berada di peringkat pertama, kemudian Partai Golkar di urutan kedua, PPP urutan ketiga, PKB urutan keempat dan PAN urutan kelima. Perolehan peringkat pertama yang disandang PDI-P pun, tidak serta merta menjadikan kader PDI-P berhasil menduduki kursi kepresidenan. Karena suara yang dimiliki PDI-P belum memenuhi standar untuk merebut posisi tersebut. Kemampuan membangun koalisi politik di antara partai-partai politik yang memiliki suara rata-rata di bawah suara yang dimiliki PDI-P, justru memunculkan sosok KH. Abdurrahman Wahid menjadi presiden RI keempat yang *nota bene* berasal dari PKB yang hanya menduduki peringkat keempat. Pemerintahan Abdurrahman Wahid sendiri berlangsung secara efektif selama 2 tahun sebelum akhirnya dilengserkan melalui Sidang Istimewa MPR. Hasil Sidang Istimewa MPR yang dinilai sarat muatan kepentingan politik tersebut akhirnya benar-benar mencabut kekuasaan Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI dan mengangkat Megawati menjadi Presiden RI kelima menggantikan Abdurrahman Wahid.

Sekali lagi, proses peralihan kekuasaan yang melengserkan presiden Wahid dan mengangkat megawati melalui Sidang Istimewa MPR terjadi secara tidak normal. Kenyataan semacam ini kian mempertegas realitas transisional kondisi sosial-politik bangsa yang memang belum stabil. Praksis, selama pemerintahan Wahid dan bahkan Megawati saat sekarang ini, situasi dan kondisi sosial-politik bangsa masih memprihatinkan dan belum dapat membawa perubahan signifikan bagi penciptaan tatanan kehidupan sosial yang demokratis sebagaimana diharapkan. Maka dari itu, tidak terlalu berlebihan jika peta sosial-politik bangsa sampai dewasa ini dikatakan masih berada pada tataran transisional yang ditandai dengan pemerintahan (kondisi negara) yang labil, kondisi sosial masyarakat yang terus bergejolak, tatanan

kehidupan perekonomian yang belum beranjak membaik, dan konflik sosial-politik yang terjadi baik di tingkat pusat maupun tingkat bawah.

### **GONJANG GANJING DI TINGKAT LOKAL: RESPON NU JEMBER TERHADAP PERUBAHAN POLITIK**

Menyikapi perubahan sosial politik bangsa tersebut, NU Jember beserta segenap warga *nahdliyin* merasa prihatin dan terpanggil untuk berpartisipasi aktif dalam memperbaiki tatanan kehidupan bangsa. Permasalahannya yang mengemuka adalah bagaimana dan melalui media apa keterlibatan NU Jember dalam proses perbaikan formasi sosial politik bangsa itu diformulasikan?. Setidaknya itulah salah satu permasalahan mendasar yang menjadi agenda perbincangan sengit di kalangan NU Jember. Dalam perdebatan tersebut, ada sebagian warga NU yang merekomendasikan agar NU Jember tetap memainkan peran dalam jalur kultural sebagaimana amanat khittah NU 1926. Namun, tidak sedikit dari mereka yang antusias merekomendasikan agar NU Jember mengusulkan pada PBNU untuk menggagas pendirian partai politik yang dapat digunakan warganya untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Pendapat yang kedua ini didasarkan pada satu argumentasi bahwa krisis sosial politik yang dialami bangsa selama ini diakibatkan oleh minimnya peran warga *nahdliyin* dalam struktur perpolitikan praktis. Mengutip pendapat seorang informan bahwa:

“keinginan kuat warga NU Jember untuk memiliki partai politik itu diibaratkan dengan menguatnya gejolak *syahwat* politik yang tidak mungkin untuk dibendung lagi. Sebagai solusinya, NU Jember diharuskan untuk memenuhi keinginan sebagian besar warga NU Jember dalam perjuangannya mendirikan partai politik sendiri”.

Keinginan kuat sebagian besar warga *nahdliyin* agar NU mendirikan partai politik tampaknya telah menjadi fenomena umum

hampir di setiap daerah. Bahkan, tidak sedikit warga *nahdliyin* yang mendeklarasikan nama-nama partai politik yang bernafaskan NU seperti Partai Kebangkitan Ummah (PKU), Partai Nahdlatul Ummah (PNU), Partai Sunni, dan lain sebagainya. Menyikapi munculnya pluralitas partai politik yang bernafaskan NU yang berpotensi ciptakan konflik internal, dan keinginan kuat warga *nahdliyin* untuk memiliki partai politik sendiri, maka PBNU, sebagaimana dikemukakan Muhid Muzadi, lantas menggelar sillaturahmi yang dihadiri para kyai dari berbagai daerah. Dalam sillaturahmi tersebut diperoleh keputusan bahwa PBNU ditugasi untuk membentuk tim sembilan yang bertugas mengkaji, menggali data ke lapangan, dan membuat rumusan yang matang perihal perlu tidaknya NU membidani kelahiran partai politik bagi warganya. Sebagaimana diprediksikan banyak kalangan, NU pun pada akhirnya membidani lahirnya partai politik yang bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kemudian diklaim sebagai saluran resmi perpolitikan bagi warganya.

Dari paparan di atas, dapat dimengerti bahwa konteks perubahan perpolitikan bangsa dapat diidentifikasi sebagai faktor determinan yang turut mengkonstruksi artikulasi politik NU Jember. Namun demikian, dimensi eksternal ini bukan merupakan satu-satunya faktor yang secara struktural-deterministik mengkonstruksi perilaku politik NU Jember. Apabila ditelusuri dari kaca mata internal warga *nahdliyin* di Jember, dinamika NU Jember dalam menstrukturkan praktek politiknya dalam kancah perpolitikan praktis didasarkan kepada beberapa pertimbangan. *Pertama*, pertimbangan "romantisisme-historis", yaitu keinginan warga NU Jember untuk dapat bernostalgia dengan kejayaan politiknya pada era 1952-1973 dan mengubur pengalaman politiknya yang tidak mengenakkan selama kurun pemerintahan Orde Baru. Dalam konteks ini KH. Muhid Muzadi mengatakan bahwa:

"warga NU Jember sepanjang pemerintahan Orde Baru seakan tidak

memiliki kebebasan sedikit pun untuk mengaktualisasikan peran politiknya sesuai dengan identitas ke-NU-an yang dimiliki. Fusi setengah hati yang dilakukan Orde Baru pada 1973 tidak memberikan ruang alternatif bagi pengembangan aktivitas perpolitikan NU Jember secara lebih proposional. Terkesan bahwa NU Jember itu hanya menjadi pendorong "gerbong" milik orang lain. Selama bergabung dengan PPP, NU Jember benar-benar *dibuntel* (dibungkus) dalam wadah PPP berdampingan dengan PDI yang *diduwuri* (dihegemoni) mesin politik Orde Baru yakni Golkar".

*Kedua*, pertimbangan "representasi", yaitu keinginan warga NU Jember untuk menuntut peran yang lebih besar dalam perpolitikan mengingat mayoritas masyarakat Jember adalah warga *nahdliyin*. Selama ini, warga *nahdliyin* hanya dijadikan sebagai obyek eksploitasi kepentingan politik oleh pihak-pihak tertentu. Untuk itu, sudah saatnya di era reformasi sekarang ini warga *nahdliyin* memegang kendali sebagai subyek politik dan mendapatkan kesempatan proporsional untuk berkiprah dalam perpolitikan. Dalam konteks ini, KH. Muhyiddin Abdussomad secara realistis juga melihat persoalan tersebut sebagai realitas empirik yang turut menjadi pertimbangan NU Jember berkepentingan mendirikan partai politik. Secara gamblang ia menuturkan bahwa:

"jumlah warga NU Jember diperkirakan mencapai kurang lebih 80 persen dari keseluruhan umat Islam di Jember. Potensi massa NU Jember yang begitu besar selama ini hanya dijadikan bahan rebutan partai-partai politik lain seperti Golkar, PPP, dan PDI. Terutama, ketika NU Jember turut keluar dari perpolitikan praktis dan menjaga jarak dengan partai-partai politik lain pasca gerakan khittah 1926. Akibatnya, potensi besar massa NU Jember menjadi terserak di mana-mana yang pada akhirnya hanya menjadikan NU Jember beserta massa yang dimiliki sebatas sebagai penyumbang suara bagi partai-partai politik milik orang/kelompok lain".

Sementara itu, seorang aktivis Ansor

## Islam, Civil Society Dan Perubahan Politik Di Era Transisi Demokrasi

(sebuah badan otonom NU) juga menegaskan bahwa apabila warga NU Jember ingin memainkan kiprah strategisnya sebagai subyek atau aktor politik, maka tidak cukup baginya hanya berkoar-koar dari luar struktur, melainkan harus ada yang berkiprah dalam struktur politik. Dengan nada evaluatif aktivis ini mengatakan bahwa:

“peran politik yang telah dimainkan NU Jember ketika murni sebagai ormas paling hanya bisa *koar-koar* (bersuara lantang) dari luar arena, tidak banyak berbuat, dan kerap menjadi tunggangan bagi kelompok-kelompok kepentingan politik lain. Untuk menyasati kondisi semacam itu, maka mutlak NU memiliki partai politik sendiri. Sebab, tidak mungkin NU merubah statusnya menjadi partai politik yang hanya akan menelantarkan program-program sosial keagamaan. Tidak mungkin pula NU menempuh jalan afiliasi dengan parpol-parpol lain karena hal itu tidak pernah membawa keberuntungan dan kemaslahatan terhadap NU sebagaimana pengalaman perpolitikan NU semasa bergabung dengan Partai Masyumi pada era Orde Lama dan PPP pada era Orde Baru. Sementara, untuk merubah diri menjadi partai politik NU juga tidak mungkin dilakukan karena akan bertentangan dengan prinsip-prinsip khittah 1926”

Ketiga, pertimbangan “idealitas” dan “moralitas”, yaitu keinginan warga NU Jember melalui partai politik yang didirikannya untuk turut memperbaiki tatanan kehidupan sosial politik yang porak poranda menuju terciptanya tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis sebagaimana spirit etik dan moralitas *Ahlu Sunnah wal Jama’ah*. Menurut KH. Mansyur Sholeh (Ra’is Syuriyah NU Jember) kerusakan sistem politik bangsa ini diakibatkan praktek perpolitikan yang tidak dinafasi oleh nafas kesantunan (keagamaan). Padahal, hakekat politik itu dalam Islam adalah “*Istisyraf al Khulq bi Thariq al Manhaj al Mustaqim min ‘Adzabi al Dunya wa min ‘Adzabi al Akhirat*” (upaya untuk memperbaiki umat dengan cara-cara yang bisa menyelamatkan dari

kesengsaraan dunia dan akhirat). Lebih lanjut, K.H. Mansyur Sholeh menjelaskan pemahaman politik versi para ulama tersebut dengan mengatakan bahwa:

“itulah pengertian politik yang sebenarnya yang diikuti para ulama NU, meskipun banyak orang menilai politiknya NU itu terbelakang. *Lha...terbelakang itu dilihat dari sudut mana. Kalau dilihat dari sudut orang yang mencari kebenaran, ya... sebetulnya tidak terbelakang. Karena kita itu mengajak kepada jalan keselamatan kok. Sebetulnya kalau dari perspektif macam-macam politik yang tidak selaras dengan ajaran Islam, barangkali itulah yang mungkin dikatakan perpolitikan NU terbelakang. Akhirnya, kalau tidak secara Islam dalam berpolitik, kita pun akan menghalalkan segala macam cara. Itulah yang perlu dipahami, sesungguhnya apa yang dimaksud politik menurut Islam dan apa sebetulnya politik terbelakang dan tidak terbelakang itu ?”*

*Keempat*, pertimbangan “pragmatis”, yaitu keinginan warga NU Jember melalui partai politik yang didirikannya dapat dijadikan sebagai instrumen untuk turut memperebutkan kapling kekuasaan. Secara terbuka, adanya orientasi kepentingan politik yang lebih praktis dan pragmatis diakui oleh tokoh-tokoh NU Jember. Bagi mereka, cukuplah logis ketika NU melalui sayap politik yang didirikannya berkepentingan menggapai target-target kekuasaan. Pasalnya, ketika NU Jember sudah terjun ke dunia politik praktis, maka tidak bisa dielakkan adanya pergerakan untuk berkompetisi memperebutkan dan/atau turut mengatur distribusi kekuasaan (*power sharing*) sebagaimana lazimnya politik itu sendiri yang sarat dengan kepentingan perebutan atau distribusi kekuasaan.

Sementara itu, menyikapi kekhawatiran sebagian kalangan NU Jember yang bersyahwat membidani kelahiran partai politik natinya akan terseret arus dalam proses-proses perpolitikan praktis sebagaimana pengalaman 1955, maka mereka yang sepakat terhadap pembentukan partai politik mencoba memberikan sang-

gahan argumentatifnya. Menurutnu, NU Jember akan memposisikan diri sebagai fasilitator saja. Setelah partai politik milik warga NU tersebut sudah berdiri, maka NU Jember akan segera menarik diri dari keterlibatannya dengan partai politik yang didirikannya, kembali ke habitatnya semula. Mengutip hasil sillaturrahi nasional para ulama tokoh NU se Indonesia yang berlangsung di Bandung 4 Juni 1998, KH. Muhid Muzadi menegaskan bahwa tidak akan pernah ada hubungan organisatoris (struktural) antara NU dan PKB. NU hanya mendesain terbentuknya partai lalu mendeklarasikannya, setelah itu partai mengurus dirinya sendiri.

Namun demikian, keinginan NU Jember untuk berjarak dengan partai politik yang dilahirkannya pada kenyataannya tidak dapat dilakukan dengan mudah. Sebaliknya, NU Jember banyak terseret arus untuk ikut mengurus proses-proses perpolitikan praktis yang sesungguhnya menjadi kewenangan PKB. Di samping itu, kepengurusan PKB banyak diisi pula oleh kader-kader yang masih aktif sebagai pengurus NU Jember. Ditambah lagi, munculnya syahwat kepentingan politik praktis dari kader-kader NU untuk mendapatkan kapling kekuasaan setelah sekian lama mereka hanya berada di luar garis struktur kekuasaan yang *nota bene* termarginalisasikan. Setidaknya fenomena ini dapat diamati dari konstruksi perilaku politik NU Jember pada even-even antara lain: kampanye pemenangan pemilu 1999, aksi demonstrasi menentang penurunan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan, pemilihan Bupati Jember periode 2000-2005, dan manuver politik NU Jember dalam persoalan pembentukan pemerintahan kota (Pemkot), keterlibatan elit-elit NU Jember dalam percaturan PemiluKada dengan mengusung kader internalnya. Kesemuanya itu merupakan even-even politik besar yang menguras energi NU Jember. Karenanya NU Jember menjadi sangat sibuk mengurus masalah politik praktis dan semakin kendor dalam mengurus program-program keummatan,

khususnya dalam mengurus dan memberdayakan *civil society* di tingkat lokal.

### **GODAAN POLITIK PRAKTIS PASCAORDEBARU: MENIMBANG ULANG KEMANDIRIAN NU JEMBER**

Tampaknya, reposisi NU Jember sebagai fasilitator dalam proses pembentukan PKB yang menjadi sayap politiknya dihadapkan kepada kenyataan empirik yang paradoksal. Pasca pembentukan PKB, muncul dilema-dilema yang dihadapi NU Jember. Pada satu sisi, NU Jember ingin melepaskan diri dari PKB dan mencukupkan diri sebagai fasilitator terhadap pembentukan PKB. Di sisi lain, NU Jember terus dituntut tanggung jawab moralnya untuk mempertahankan, mengembangkan dan membesarkan PKB. Sebab, tanpa adanya dukungan riil dari NU, dapat dipastikan, PKB tidak akan bisa menjadi partai besar. Karena modal sumberdaya manusia terbesar PKB itu mayoritas adalah warga NU. Hal ini mempertegas kenyataan bahwa PKB itu merupakan organisasi/partai politik berbasis massa. Seperti halnya juga keberadaan NU yang dikenal sebagai organisasi massa.

Dihadapkan kepada situasi dan kondisi semacam itu, NU Jember pun merasa terpanggil untuk terlibat penuh dalam mendampingi setiap proses perpolitikan PKB. Kiprah NU Jember terus berlangsung sehingga kerap menyeretnya masuk ke area perpolitikan praktis. Di samping itu, NU Jember sendiri merasa berkeajiban untuk mensosialisasikan amanat hasil Rapat Pleno PBNU ke-4 tanggal 24 Juli 1998 di Hotel Alia Jakarta Pusat yang isinya menyerukan agar seluruh warga NU memberikan dukungan dan memelihara PKB sebagai satu-satunya partai milik warga NU. Dari hasil Rapat Pleno tersebut juga dinyatakan bahwa PKB merupakan wadah aspirasi NU untuk memperjuangkan kepentingan NU di bidang sosial-poli-

## Islam, Civil Society Dan Perubahan Politik Di Era Transisi Demokrasi

tik dan kenegaraan.<sup>12</sup>

Karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka NU Jember kelihatan terus berusaha melakukan pendampingan dan keberpihakan terhadap PKB. Keterlibatan NU Jember ke dalam aktivitas perpolitikan praktis melalui PKB tidak hanya tampak semarak ketika pembentukan dan pendeklarasian PKB cabang Jember. Aktivitas perpolitikannya semakin meningkat, khususnya menjelang persiapan kemenangan pemilu 1999 dan dalam hajatan pemilihan umum baik tingkat nasional, regional dan lokal (Pemilukada). Karena alasan waktu persiapan pemilu yang sangat pendek, maka menjadikan tokoh-tokoh NU Jember bekerja ekstra keras untuk mempersiapkan diri menjadi kontestan pemilu. Tidak sedikit dari jajaran para kyai sepuh yang menyempatkan diri terjun langsung ke gelanggang perpolitikan praktis guna membantu kemenangan partai politik milik NU yang telah didirikannya. KH. Ahmad Mursyid, KH. Rawasil, KH. Mansyur Sholeh, KH. Khatib dan KH. Muhyiddin Abdus Shomad, merupakan tokoh-tokoh kunci yang turut terjun berkampanye memobilisir warga NU Jember untuk berpartisipasi menyalurkan aspirasi politiknya ke dalam PKB. Kerap, praktek mobilisasi massa lewat kampanye yang dilakukan tokoh-tokoh NU Jember memanfaatkan sentimen ideologis dan simbol-simbol keagamaan NU seperti ungkapan bahwa PKB itu satu-satunya partai yang didukung penuh para ulama NU, maka dari itu memilih PKB bagi warga NU itu adalah suatu keharusan. Apabila dikaitkan dengan pendapat Geertz, maka praktek politik NU Jember khususnya yang masih mendasarkan sentimen ideologis keagamaan untuk kepentingan-kepentingan politiknya itu semakin menunjukkan watak dari perilaku politik aliran, yakni suatu kekuatan politik yang didasarkan kepada ideologi sebagai perekatnya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Badrun Alaena, *NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000, hlm. 103-104.

<sup>13</sup> Bahtiar Effendy, *Repolitikasi Islam*, hlm.

Keterlibatan praksis NU Jember dengan segenap elemen kewargaannya menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan PKB. Tercatat, PKB berhasil menempatkan diri pada peringkat pertama perolehan suara dengan 17 kursi. PDI-P berada di urutan kedua dengan perolehan 11 kursi, Partai Golkar 4 kursi, PPP 4 kursi, PAN 2 kursi, Partai Sunni 1 kursi, PKU 1 kursi, dan TNI/POLRI 5 kursi (Kahumas Kabupaten Jember: 13). Menurut K.H. Muhid Muzadi, bila dibandingkan dengan hasil pemilu 1955 dan 1971, perolehan suara NU melalui PKB cenderung agak menurun. Pada pemilu 1955 dan 1971, NU dapat memperoleh suara sebesar 15 %. Sementara, pada pemilu 1999 prosentase hasil perolehan suara NU melalui PKB sekitar 10 % saja. Kondisi perolehan hasil suara semacam ini terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maraknya partai-partai politik NU yang memperoleh hasil suara berasal dari warga NU juga. Berbeda dengan pemilu 1955 dan 1971 di mana partai politik dari NU cuma satu yakni Partai NU. Sementara sekarang ini, dari lingkungan internal warga NU muncul partai-partai yang aneka ragam seperti PNU, PKU, Partai Sunni dan PNU.

Pasca kemenangan pemilu 1999, keterlibatan NU Jember di dalam aktivitas perpolitikan praktis tampaknya masih terus berlangsung. Terlebih lagi dengan terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid (seorang tokoh NU paling terkemuka pada dekade terakhir ini dan mantan ketua PBNU selama beberapa periode) sebagai presiden RI keempat hasil pemilu 1999. Terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid menimbulkan euforia politik di lingkungan warga NU di berbagai daerah, termasuk di daerah Jember, salah satu kantong NU terbesar di Jawa Timur. Naiknya KH. Abdurrahman Wahid menjadi pemimpin nasional membuka ruang pemaknaan tersendiri bagi warga NU untuk kemudian mengambil tindakan politik *cooperative* dengan pusat-pusat kekuasaan. Pada akhirnya, perilaku

363.

politik *cooperative* yang ditunjukkan NU Jember ini telah membawanya kembali pada keadaan yang serba oportunistik sebagaimana perilaku politik NU Jember pada era pemerintahan Orde Lama. Meminjam terminologi Geertz, pergeseran perilaku politik NU Jember sekarang ini menunjukkan dimensi kelanjutan (*continuum*) dari kultural ke struktural. Pasca khittah, NU Jember menampilkan potret perilaku kultural, dan kini ia lebih menampilkan potret perilaku yang struktural.<sup>14</sup>

Belum berlangsung terlalu lama pemerintahan presiden KH. Abdurrahman Wahid mulai muncul aksi-aksi sosial politik yang bermuara kepada perongrongan kewibawaan dan otoritas kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid baik yang dilakukan organisasi-organisasi massa di luar parlemen maupun partai-partai anggota dewan di dalam parlemen. Praksis sepanjang pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid, elemen-elemen NU Jember dengan segenap potensi sosial yang dimilikinya terserap dan diorientasikan kepada kegiatan-kegiatan perpolitikan praktis untuk mendukung atau *mem-back up* keberlangsungan kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid. Aktivitas perpolitikan NU Jember dilakukan melalui aksi demonstratif yang menyuarakan agar kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid dipertahankan hingga periode 2004. Pada saat bersamaan, perjuangan NU Jember ditempuh pula melalui kekuatan politik di parlemen DPRD Jember. Potensi sosial NU Jember kian terserap pada saat terjadi konflik yang meruncing antara pemerintahan Abdurrahman Wahid dengan anggota dewan yang berujung pada penggelaran Sidang Istimewa (SI) dan berakhir dengan keputusan Dekrit Presiden dan Pencabutan Mandat presiden oleh MPR. Secara makro, tampak sekali perilaku politik warga NU Jember dalam mendukung kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid, cenderung radikal. Aksi penebangan pohon, pemboikotan jalan, dan pembentu-

kan pasukan berani mati di daerah-daerah kantong NU seperti Jember, cukup dominan mewarnai aksi radikalisme perilaku politik NU Jember pasca Orde Baru. Pada akhir pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid, perilaku politik NU Jember dapat dikategorikan --meminjam istilah Mitsuo Nakamura-- kembali berada dalam "fase radikal".

Kasus serupa terjadi pula saat NU dan PKB Jember gagal dalam perebutan Bupati Jember yang kemudian dimenangkan Partai Golkar yang hanya mengantongi 4 kursi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember. Gerakan massa dengan nama "Musyawarah Masyarakat Jember" yang melibatkan elemen-elemen kewargaan NU Jember dalam rangka menolak hasil pemilihan Bupati Jember, mencerminkan radikalisme sikap dan perilaku politik (warga) NU Jember. Praksis, dalam semua tindakan perpolitikan yang dilakukan NU Jember melalui PKB kembali menelan kepahitan akibat kegagalan-kegagalan yang dialami dalam proses perebutan kursi kekuasaan. Ironisnya lagi, tindakan perpolitikan yang dilakukan kader-kader NU di PKB telah menyerap potensi sosial warga dan tokoh-tokoh NU untuk terlibat di dalamnya. Bertolak dari beberapa kasus semacam ini, dapat dikatakan bahwa perilaku politik NU Jember mulai dari proses pembentukan PKB, keterlibatan dalam pemilu 1999, era kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid, sampai terdepaknya KH. Abdurrahman Wahid dari kursi kepemimpinan nasional yang kemudian digantikan Megawati Soekarno Putri, tindakan dan aktivitas perpolitikan NU Jember cenderung kuat menunjukkan pergeseran perilaku dari pola perilaku politik kultural ke arah pola perilaku politik struktural. Menurut tokoh-tokoh NU Jember, nuansa pergeseran perilaku politik kultural ke arah perilaku politik struktural yang terjadi pada diri NU Jember itu sifatnya hanya sementara dikarenakan masyarakat NU Jember masih berada dalam masa euforia politik. Setelah kondisi normal dan semakin kondusif, tindakan-tinda-

<sup>14</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 21.

## Islam, Civil Society Dan Perubahan Politik Di Era Transisi Demokrasi

kan yang mengarah ke perpolitikan praktis yang dilakukan NU Jember tidak akan terjadi kembali.

Dari gambaran di atas, dapat ditangkap adanya nuansa pergeseran orientasi dan perilaku politik NU Jember era pasca Orde Baru. Kalau sebelumnya aktivitas-aktivitas perpolitikan NU Jember lebih berorientasi kepada --meminjam istilah A. Gaffar Karim-- aspek kualitatif, kini aktivitas perpolitikan NU Jember mulai mengalami pergeseran orientasi kepada aspek kuantitatif dengan target perebutan kursi kekuasaan di pemerintahan. Tuntutan adanya *representativeness government* pun, tampaknya menjadi agenda perjuangan politik yang semakin diprioritaskan.<sup>15</sup>

Padahal, pasca khittah 1926, aktivitas perpolitikan NU Jember banyak berorientasi kepada gerakan politik kultural di mana NU Jember lebih memilih aktualisasi peran politiknya dari luar struktur kekuasaan negara, dalam kapasitasnya -meminjam istilah KH. Achmad Shiddiq, Bapak pencetus khittah 1926-- sebagai "moral force" dan tidak terlalu memperhitungkan persoalan *representativeness government*. Potret pergeseran pola perilaku politik NU secara umum, termasuk NU Jember tentunya, pasca khittah dikemukakan secara jelas oleh A. Gaffar Karim (1997: 146). Menurutnya, pasca khittah 1926, NU secara umum mengalami perubahan reorientasi politik yakni reorientasi dari kuantitas politik menuju kualitas politik. Makna reorientasi di sini adalah, NU meninggalkan politik praktis dan politik kelembagaan yang berkuat pada perhitungan berapa banyak perolehan suara dalam pemilu, berapa banyak orang-orang NU yang duduk dalam supra-struktur politik, dan seterusnya. Ukuran sukses politik NU, kini bukan lagi segi kuantitatif semacam itu, tetapi lebih kepada sejauh mana pikiran-pikiran, konsep-konsep NU, serta para warga NU di lembaga-lembaga

<sup>15</sup> Arief Afandi (ed.), *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 4.

politik yang ada bisa memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa dan negara.

Sementara itu, dilihat dari perspektifnya Kuntowijoyo, NU pasca khittah mulai mencoba untuk melakukan haluan gerakan politik dari pola gerakan yang menitikberatkan aspek kuantitatif (*power politics*) menuju kepada aspek kualitatif (*substantive politics*).<sup>16</sup> Apabila dikaitkan dengan realitas empirik aktivitas perpolitikan NU Jember saat sekarang ini, menunjukkan sisi paradoksalnya di mana di mana perpolitikan NU Jember era pasca Orde Baru lebih berorientasi kepada "kuantitas politik" daripada "kualitas politik". Menurut Bahtiar Effendy, pergeseran orientasi dan perilaku politik NU Jember demikian itu, diakui atau tidak, disukai atau tidak, telah merontokkan sendi-sendi khittah.<sup>17</sup>

Munculnya fenomena pergeseran reorientasi politik NU Jember sekarang ini, tampak paradoks pula jika dikaitkan dengan keberadaan organisasi NU yang dulu dikenal sebagai representator *interest group*, yakni organisasi yang aktif memainkan peran politiknya di luar struktur perpolitikan praktis dengan jalan mengontrol kebijakan pemerintah tanpa memiliki kepentingan untuk masuk dan mendapatkan jabatan politik di lingkaran kekuasaan. Seperti yang dikemukakan Almond bahwa sebuah kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa pada saat yang sama berkeinginan untuk memperoleh jabatan publik.<sup>18</sup>

### PENUTUP

Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa: (1) praktek perpolitikan yang diproduksi dan direproduk-

<sup>16</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, hlm. 212.

<sup>17</sup> Bahtiar Effendy, *Repolitisasi Islam*, hlm., 179.

<sup>18</sup> A. Gaffar Karim, *Metamorfosis, NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 1995, hlm 32.

si oleh NU Jember era pasca Orde Baru itu merupakan representasi dari proses dialektika yang dinamik dan kreatif antara NU Jember sebagai *human agency* dengan struktur sosial yang satu sisi memunculkan *constrains* dan sekaligus *enabling*; (2) perubahan peta sosial politik bangsa akibat reformasi, pengalaman historis dalam perpolitikan baik yang mengenakan maupun yang tidak mengenakan, pertimbangan praktis dan pragmatis, orientasi nilai dan perubahan sosial, yang terjalin dalam apa yang disebut *events*, merupakan variabel kontekstual yang turut mengkonstruksi praktek perpolitikan NU Jember pasca Orde Baru; (3) dilihat dari kecenderungan artikulasi politik NU Jember era pasca Orde Baru itu, maka dapatlah diidentifikasi ke dalam suatu corak praktek perpolitikan yang kian pragmatis. Setidaknya realitas ini ditandai oleh keterlibatan NU Jember yang kian intensif ke dalam arena percaturan politik praktis, berorientasi pada perjuangan memperebutkan kapling kekuasaan, dan makin jauh saja dari kerja-kerja kulturalnya, utamanya dalam pemberdayaan *civil society* di tingkat lokal. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa telah terjadi disorientasi atau tepatnya pergeseran praktek perpolitikan NU Jember pada era pasca Orde Baru dari sebelumnya bercorak *kultural-kritis-transformatif* kini cenderung menampilkan wataknya yang *struktural-pragmatis-opportunistik*; (4) pergeseran praktek perpolitikan NU Jember membawa implikasi sosial kurang konstruktif antara lain berupa terabaikannya misi utama NU Jember kapasitasnya sebagai organisasi sosial-keagamaan strategis dalam pelaksanaan kerja-kerja kulturalnya, NU Jember makin sulit menjaga jarak dengan pusat kekuasaan, demikian pula warga *nahdliyin* semakin intensif dalam konflik-konflik kepentingan, warga *nahdliyin* terkotak-kotak ke dalam friksi politik dan semakin terlantarkan. Dan lebih penting dari itu semua, NU Jember kehilangan kekuatan politiknya yang paling riil sebagai *balance* terhadap kekuasaan, sehingga membuatnya terom-

bang-ambing dalam fluktuasi politik yang terus berubah.

Berdasarkan simpulan di atas, maka disarankan terkhusus kepada elit-elit NU Jember untuk tidak menyeret organisasi milik kaum sarungan ini ke ranah percaturan politik praktis. Sudah semestinya, mereka menempatkan kembali NU ke dalam khittahnya yang lebih menekankan pada penguatan *civil society* sebagai prasyarat terciptanya perubahan tatanan kehidupan sosial-politik yang lebih demokratis. Aktivitas perpolitikan NU Jember seniscayanya tidak ditempatkan dalam konteks perpolitikan praktis, melainkan partisipasi politik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alagappa, Muthiah (ed.). 2004. *Civil Society and Political Change in Asia*. California: Stanford University Press.
- Arato, Andrew. 2000. *Civil Society, Constitution, and Legitimacy*. Lahm, Md: Rowman & Littlefield.
- Aspinall, Edward. 2004. *Indonesia Transformation of Civil Society and Democratic Breakthrough*, dalam Muthiah Alagappa (ed.) *Civil Society and Political Change in Asia*. California: Stanford University Press.
- Alaena, Badrun. 2000. *NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ali, Fachry dan Iqbal Abdul Rauf Saimima. 1991. Merosotnya Aliran Dalam Partai Persatuan Pembangunan, dalam LP3ES, *Analisa Kekuatan Politik Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Anam, Choirul. 1999. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Bisma Satu.
- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Budiman, Arif (ed.). 1990. *State and Civil Society in Indonesia*. Australia: Centre for Asian Studies Monash University.
- Bruinessen, Martin van. 1994. *Tradisi*,

## Islam, Civil Society Dan Perubahan Politik Di Era Transisi Demokrasi

- Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Konjungtur Sosial Politik di Jagat NU Paska Khittah 1926: Pergulatan NU dekade 1990-an*, dalam Ellyasa K.H. Darwisa (ed.) *Gus Dur dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS.
- Cohen, Jean L. and Andrew Arato. 1992. *Civil Society and Political Theory*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Cohen, Ira J. 2008. *Teori Strukturasi dan Praksis Sosial*, dalam Anthony Giddens & Jonathan Turner, *Social Theory Today*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, Bahtiar. 2000. *Repolitikasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik ?*. Bandung: Mizan.
- Fealy, Greg. 1997. *Wahab Chasbullah, Tradisionalisme dan Perkembangan Politik NU*. dalam Greg Fealy & Greg Barton (ed.) *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LKiS.
- Feillard, Andree. 1994. *Nahdlatul Ulama dan Negara: Fleksibilitas, Legitimasi dan Pembaharuan*, dalam Ellyasa K.H. Darwis (ed.) *Gus Dur dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_. 1999. *NU Vis a Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: LKiS.
- Giddens, Anthony. 1973. *The Class Structure of the Advanced Societies*. New York: Barnes and Noble.
- Giddens, Anthony. 1989. *A Replay to My Critics*, dalam Held dan Thomson (ed.) *Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and his Critics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Giddens, Anthony. 2009. *Problematika Utama Dalam Teori Sosial Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*, terj. Dariyatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony. 2003. *The Constitution of Society, Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*. Terj. Adi Loka Sujono dari judul asli *The Constitution of Society: The Outline of the Theory of Structuration* (Polity Press Cambridge-UK, 1995). Pasuruan: Penerbit Pedati.
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, Syamsuddin. 1990. *NU dan Politik: Perjalanan Mencari Identitas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2007. *Ruang Publik Untuk Memperjuangkan Kepentingan Politik*, dalam Ning Retnaningsih dkk. (ed.) *Ruang Publik Untuk Memperjuangkan Kepentingan Politik, Dinamika Politik Lokal di Indonesia*. Salatiga: Percik & The Ford Foundation, 2007, hlmn. 46.
- Hall, John A. 1995. *In Search of Civil Society*, dalam Johan A. Hall (ed.) *Civil Society: Theory, History, Comparison*. Cambridge, Massachusetts, Polity Press.
- Haryatmoko. 2003. *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu*, dalam Basis Nomor 11-12, Tahun Ke-52, November-Desember. Yogyakarta: Kanisius.
- Hefner, Robert W. 2001. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hefner, Robert W. 1999. *Geger Tengger Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*. Terj. A Wisnuhardana dan Imam Ahmad (*The Political Economy of Mountain Java An Interpretive History*). Yogyakarta: LKiS.
- Hikam, Muhammad A.S. 1999. *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Erlangga.
- Juliawan, B. Hari. 2004. *Ruang Publik Habermas: Solidaritas Tanpa Intimitas*, dalam *Jurnal Basis*, Nomor 11-12, Tahun Ke-53, November-Desember. Yogyakarta: Kanisius.
- Karim, Gaffar. 1995. *Metamorfosis, NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta:

- LKiS.
- Kleden, Ignas. 2000. *Melacak Akar Konsep Demokrasi: Suatu Tinjauan Kritis*, dalam Ahmad Suaedy (ed.) *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Komisi Pemilihan Umum, tt. *Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta. Tanpa Identitas Penerbit.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Maridjan, Kacung. 1992. *Quo Vadis NU Setelah Kembali Ke Khittah 1926*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Muukkonen, Martti. 2009. *Framing the Field: Civil Society and Related Concepts*, dalam *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*. 38. Sage Publication.
- Munharif, Ali, Hendro Prasetyo dkk. 2002. *Islam & Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Parkin, Frank. 1978. *Social Stratification*, In Tom Bottomore and Robert Nisbet, eds, "A History of Sociological Analysis". New York: Basic Books.
- Nakamura, Mitsuo. 1997. Tradisionalisme Radikal Catatan Muktamar Semarang 1979. Dalam Greg Fealy & Greg Barton (ed.) *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LKiS.
- Noeh, Munawar Fuad & Mastuki HS. 1999. *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Achmad Siddiq*. Jakarta: Logos.
- Ramage, Douglas E. 1995. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. London and New York: Routledge.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Social Organizations: Nahdlatul Ulama and Pembangunan*, dalam Richard W. Baker dkk. (ed.) *Indonesia: the Challenge of Change*. Singapore: Institute of Southeast ASIAN Studies.
- Rauf, La Ode Abdul. 1999. *Peranan Elit dalam Proses Modernisasi, Studi Kasus di Muna*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ritzer, George – Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salim, Hairus H.S. 1999. *Panggung Politik NU*, dalam Marzuki Wahid dkk. (ed.) *Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna*. Jakarta: Lakpesdam NU dan Kompas.
- Siddiq, Achmad, K.H. 1984. *Sikap Sosial Ahlus Sunnah, Integratif, Selektif, Akomodatif*. *Makalah*. Jember: tidak diterbitkan.
- Soebahar, Abdul Halim. 2001. *Arsitek Pemikiran Islam Indonesia (Catatan Biografi KH. Achmad Siddiq)*. Jember: Tanpa Penerbit.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Tusalem, Rollin F. 2007. *A Boon or a Bane ? The Role of Civil Society in Third- and Fourth-Wave Democracies*, dalam *International Political Science Review*. 28. Sage Publication.
- Uhlin, Anders. 2009. *Which Characteristics of Civil Society Organizations Support What Aspects of Democracy ? Evidence from Post-Communist Latvia*, dalam *International Political Science Review*. 30. Sage Publication.
- Yamamoto, Tadashi (ed.). 1996. *Emerging Civil Society in the Asia Pasific Community*. Singapore: ISEAS.

Islam, Civil Society Dan Perubahan Politik Di Era Transisi Demokrasi